

MEMAHAMI ACEH (Menuju Pilpres 2009 yang damai)¹

Kamaruddin Hasan*

Pengantar

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui. (al-Quran: 49:13)

Ayat di atas, adalah satu petunjuk Allah, menyangkut hal ikhwal alam kodrat manusia dalam urusan bagaimana merajut dan membangun suatu kehidupan bersama baik dalam konteks kehidupan antar individu, kelompok/komunitas/etnis, Bangsa maupun antar negara. Tuhan memberi pedoman kepada manusia yang berpikir, bahwa eksistensi makhluk manusia memiliki sifat-sifat, hukum-hukum dan norma-norma yang secara kodrati melekat sebagai suatu keniscayaan universal. Konsekwensi logisnya, kehidupan manusia yang berkelompok-kelompok itu mensyaratkan perlunya membangun relasi, interaksi, komunikasi, interkoneksi dan jejaringan dan kerjasama, untuk kemudian satu sama lain hendaknya menjadi saling mengenal, mengerti dan memahami, bersama segala bentuk keharusan komunikatif dan sosiologis lainnya, seperti keharusan tolong menolong, berkorban, toleransi dan akomodasi. Karena hal-hal tersebut adalah sangat berperan penting dan berguna dalam membangun dan membina suatu tata kehidupan bersama yang harmonis, saling mengayomi dan mendamaikan.

Dari realitas pengalaman sejarah kehidupan yang panjang ini, terbentuklah berbagai unsur alam pikiran dasar yang meliputi: *world-view, common sense, kepercayaan, tata-nilai, upacara-upacara* dan *prinsip-prinsip, system kebudayaan, mitologi, totemisme* dan *ritual*. Semua ini disepakati, dipercayai, dipegang-teguh dan diyakini secara bersama sebagai kaedah-kaedah normatif yang mengikat dan mejadi elemen-elemen dasar bagi konstruksi kehidupannya. Kaedah-kaedah normative ini, terkadang memiliki tingkat sakralitas tertentu, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai ajaran agama, latar filosofi kehidupan dalam menata kehidupan bersama, yang kemudian dianggap agung, dimuliakan dan muncul menjelma ke dalam dan mewarnai pola-pikir dan pola prilaku, yang pada gilirannya menjadi kebiasaan, adat istiadat dan kebudayaan. Dan proses tersebut juga dialami oleh Aceh, sehingga ada yang menyebutkan bangsa yang “keras kepala”, militan dan lain-lain. Hal ini bisa kita lihat dalam pepatah-pepatah Aceh, antara lain: “*ni bak siget, leubeh got roe, ni bak puteh mata leubeh got puteh tuleung*”, “*Ureung Aceh, meunyo ka teupeh bu leubeh han geupeetaba*”, *meunyo ka pakat lampouh jrat ta peugala*”. Dan lain-lain.

Memahami Sejarah Aceh

Saya kira yang penting dipahami dari awal adalah sejarah tentang Aceh secara konfrehensif, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam membangun Aceh. Sejarah bisa dijadikan landasan.

¹ Makalah disampaikan dalam Panel Forum “Arah Strategis Rakyat Aceh Dalam Pilpres 8 Juli 2009” yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS) Aceh-Jakarta bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI (P2P-LIPI), Kamis, 25 Juni 2009 di Gedung LIPI Jakarta

Yang tidak diharapkan masyarakat terbuai dengan sejarah. Karena sejarah merupakan wacana yang selalu aktual. Sejarah tidak kenal kadaluarsa atau *expired*. Kecuali, jika sejarah dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kaisar Akihito mengatakan: “Tugas utama setiap orang adalah mengenal sejarah agar mengetahui asal-usulnya.” Begitu pula kata pemimpin Cina Jiang Zemin: “Sejarah itu ibarat cermin dan kita harus belajar untuk memahami latar belakang permasalahan guna melangkah ke masa depan. John Elliott mengungkapkan hal senada: “Sejarah itu sangat mustahak. Tanpa suatu perspektif yang diperoleh dari kejadian-kejadian masa lalu, bagaimana kita dapat menghadapi masalah-masalah hari ini ataupun hari esok?” Prof Olle Törnquist Ph.D juga menggarisbahawahi bahwa Aceh sejak zaman imprealis hingga kini, Aceh telah menjadi laboratorium politik, sosial, budaya dan hukum yang menarik peneliti internasional untuk mengkaji.²

Sejarah politik, ekonomi dan budaya telah dipraktekkan oleh Aceh dengan berbagai keunikannya. Ketika kita menelusuri berbagai sumber, ternyata Aceh merupakan Negara pertama di Asia Tenggara pada abad pertengahan yang sudah di kenal dan di Eropa. Tak sedikit pembesar-pembesar Eropa berkunjung ke Aceh terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Aceh juga telah menjalin hubungan kerjasama, relasi-komunikasi dan diplomatik dengan Turki pada dinasti Kesultanan Ottoman. Dari bahan-bahan perpustakaan luar negeri, Aceh menjadi menonjol pada masa Perang Aceh yang menghiasi media-media terkemuka di Eropa dan Amerika-Serikat. Bahkan Perang Aceh merupakan pemicu bangkitnya nasionalisme kemerdekaan bangsa-bangsa di Afrika dan Timur tengah lainnya melakukan perlawanan gigih mengusir kolonialisme dan imperialism Eropa.³ Dalam hal ini, Aceh mesti dilihat sebagai suatu identitas politik, hukum, sosial budaya dan ekonomi sudah lama terbentuk sejak awal abad ke XVI (1520 M). Yang ditandai terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah. Dua pilar yang mendasari dan mewarnai identitas masyarakat Aceh adalah Islam dan perdagangan. Menurut J.C.Van Leur, melihat masyarakat Aceh yang egaliter termasuk masyarakat ideal maritim yang tentunya amat berbeda dari ideal tipe masyarakat agraris. Apalagi Aceh terkenal sebagai wilayah yang memiliki resistensi terhadap segala upaya yang ingin mendominasi (apalagi ”menjajah). Kahin 1990, mengenai revolusi Aceh mengilustrasikan bahwa sejak dulu revolusi sosial politik di Aceh senantiasa dipadukan dalam pandangan Islam.⁴ Bahwa bagi Aceh ancaman dari luar yang khususnya dimaknai orang Aceh sebagai bentuk ”penjajahan”, akan menimbulkan perlawanan bagi mereka. Aceh termasuk senditif terhadap orang-orang luar yang berkeinginan untuk menguasai Aceh. Orientasi ke-Aceh-an ini terkait dengan identitas Aceh, komitmen kepada Islam yang kuat, bahasa dan adat istiadat serta harga diri orang Aceh yang merupakan unsur-unsur yang melandasi identitas ke-Aceh-an.⁵

² Prof. Olle Törnquist Ph.D dalam sebuah diskusi di Banda Aceh November 2008

³ Harry Kawilarang, sekapur sirih “ Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki, Bandar Publishing, 2008.

⁴ Audry R. Kahin, Pergolakan tiga daerah, (Jakarta: graffiti, 1990, hlm. 142-176), seperti yang dikutip Moch. Nurhasyim, Peundingan Helsinki: Jalan menuju DamaiAceh. Dalam Beranda Perdamaian Aceh Tiga tahun Pasca MoU Helsinki, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 87

⁵ Anthony Reid, Ed., *Verendah of Violence The Background to the Aceh Problem*, (Singapore University Press, 2006), hlm. 12.

Sekilas catatan perjalanan sejarah Aceh, kita mulai dari tahun 1857 Aceh dan Belanda pernah menandatangani perjanjian damai pencegahan pembajakan, namun pada tahun 1873 tepatnya 26 Maret Belanda menyatakan Perang terhadap Aceh di Kapal Perang Citadel Van Antwerpen dan tanggal 23 April Belanda menyerang Aceh namun Panglima Perang Belanda jenderal Kohler tewas tertembak pejuang Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman. Pada 25 Desember 1876 Belanda melakukan serangan ke dua namun tetap gagal. Perang Aceh-Belanda merupakan Perang terlama dalam sejarah kolonial 1876-1896. Selanjutnya pada Tahun 1939 tanggal 5 Mei para ulama mendirikan organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh dengan tujuan memperbaiki sistem pendidikan. 12 Maret 1942 kekuasaan Belanda berakhir di Aceh karena perang Dunia II dan masuknya Jepang ke Aceh. Pada tanggal 28 Maret Belanda menyerah kalah di Aceh.⁶

Tahun 1945 berkecamuk perang saudara di Aceh, 15 September Teuku Muhammad Daud Cumbok, putra ulee balang Gampong Cumpok menentang kemerdekaan RI di Aceh, kejadian ini dikenal dengan "Perang Cumbok". Perang saudara ini dimanfaatkan dengan baik oleh Soekarno. 16 Juni 1948 Presiden Soekarno di Hotel Atjeh Kutaraja bersumpah atas nama Allah untuk memberikan hak-hak rakyat Aceh dan menyusun rumah tangga sesuai Syariat Islam. Tahun 1948-1949 sekitar 3.000 Rakyat Aceh ikut berperang "Medan Area" untuk mempertahankan Indonesia dari Belanda. Tahun 1949 Rakyat Aceh menggalang pengumpulan dana untuk membiayai pemerintah RI. Dalam dua hari terkumpul 500.000,- Dollar Amerika yang disalurkan 250.000 Dollar Amerika kepada angkatan Perang, 50.000 untuk perkantoran, 100.000 untuk pengembalian pemerintah dari Yogyakarta ke Jakarta dan 1.000 kepada Pemerintah pusat melalui AA. Maramis. Kemudian Aceh mengumpulkan 5 kg emas untuk membeli obligasi pemerintah membiayai perwakilan RI di Singapura, pendirian Kedutaan Besar RI di India dan membeli dua pesawat terbang untuk transportasi pejabat RI. Namun demikian tanggal 23 Januari 1951 Perdana Menteri M. Natsir membacakan surat peleburan Propinsi Aceh ke Propinsi Sumatera Utara di RRI Banda Aceh. Tanggal 21 September 1953 Daud Beureueh memproklamkan Darul Islam setelah kongres ulama di Titeue Pidie. Namun kemudian 23 September Daud Beureueh diangkat sebagai Kepala Negara dan Wali Negara Aceh dalam kongres Rakyat Aceh atau kongres Batee Krueng dan Indonesia pada tanggal 27 September mengirimkan pasukan dengan sandi Operasi 19 Agustus ke Aceh. Tanggal 27 Januari Menteri Dalam Negeri Sunaryo melantik Ali Hasjmy sebagai Gubernur Aceh dan Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu sebagai Panglima Komando Daerah Militer Aceh.

Pada tanggal 8 April 1957 Perjanjian Ikrar Lanteh sebagai bentuk gencatan senjata antara Darul Islam dengan Indonesia., isinya:

kami putera-putera Aceh, dipihak manapun berada akan berjuang sungguh-sungguh untuk menjunjung tinggi kehormatan Islam, menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan rakyat Aceh.

Pada 16 Mei 1959 Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdiri, Wakil Perdana Menteri RI Mr. Hardi mengeluarkan Surat keputusan Nomor 1/Missi/1959, isinya memberikan otonomi bidang

⁶ Diolah dari berbagai sumber.

pendidikan, agama dan adat istiadat. Namun demikian pada tanggal 15 Desember 1961 Daud Beureueh memproklamkan Republik Islam Aceh di Aceh Utara. Pada tanggal 22 Desember 1962 terjadi Rekonsiliasi dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA) yang melahirkan Ikrar Blang Padang. Tahun 1972 Daud Beureueh mengumpulkan kekuatan DI/TII untuk menggalang perlawanan pemerintah pusat dan mengutus Zainal Abidin (Menteri Dalam Negeri Pemerintah Islam Negara Aceh) menjemput kakanya Hasan Tiro di Kolumbia Amerika.

Pada tanggal 4 Desember 1976 Hasan Tiro Mendeklarasikan Aceh Merdeka (AM) di Gunung Tjokka pada sabtu pagi Tiro Pidie. Tahun 1978-1982 ABRI menggelar “operasi Sadar”, “Operasi Jeumpa”, “Operasi Siwah” memburu anggota AM. Bulan Mei tahun 1989 Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah. Bulan Agustus 1993 Draf Resolusi Persoalan Timor Leste, Aceh dan Papua Barat dibahas di Markas PBB Jenewa. Di bawah Presiden Soeharto, kekecewaan rakyat Aceh sekali lagi mulai memuncak. Status daerah istimewa menjadi semakin tidak bermakna dengan kecenderungan setralisme pemerintah di Jakarta, terlihat dari beberapa pembatalan atas upaya penerapan peraturan daerah dalam berbagai bidang, termasuk hukum Islam. Kemajuan industri, setelah penemuan cadangan gas bumi besar di utara Aceh pada tahun 1971, ditandai dengan migrasi pekerja dari luar Aceh dalam jumlah yang cukup besar ke wilayah ini dan dirasakan oleh banyak penduduk lokal sebagai mengganggu dan eksploitatif. Pada era 1970-an, hanya sejumlah kecil proporsi pendapatan dari Zona Industri Lhokseumawe kembali kepada pemerintah Aceh. Selain itu, tidak teraktualisasikannya identitas keacehan dalam wadah *nation state* yang dijalankan dengan sistem politik yang mendominasi, hegemonic, sentralistik, militeristik dan otoriter oleh pemerintah pusat. Pada bulan Juli 1998 Gubernur Syamsuddin Mahmud mengirim surat resmi kepada Presiden BJ. Habibie meminta DOM di cabut. Pada 17 Agustus Panglima ABRI Jenderal Wirando pada masa BJ. Habibie mencabut status Aceh sebagai daerah Operasi Militer (DOM) setelah sepuluh tahun diterapkan.

Pada 4 Februari element mahasiswa, santri dan sipil yang diikuti 106 organisasi lainnya melalui Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS) mendirikan Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) di Banda Aceh. Tanggal 13-14 Desember 1999 diadakan musyawarah ulama Dayah Se-Aceh di komplek Makam Syahkuala Banda Aceh mendesak pemerintah melaksanakan Referendum di Aceh sebagai jalan tengah antara otonomi khusus dan merdeka. Selanjutnya pada tanggal 8 November 1999 SIRA menggelar Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR) di Mesjid Baiturrahman Banda Aceh yang di hadiri paling kurang 600.000 rakyat Aceh. Dan pada tahun yang sama tanggal 29 Juli 1999 Megawati berjanji jika terpilih menjadi Presiden tidak akan menumpah setetes darahpun di Aceh. Sepertinya masa Megawati masih mempraktekkan Nasionalisme sempit.

Perjalanan Proses Damai Aceh

Tanggal 27 Januari 2000 Dubes RI untuk Jenewa Hasan Wirajudha bertemu dengan Hasan Tiro di Bavois Jenewa yang difasilitasi oleh Hendry Dunant Center (HDC). Hasan Tiro didampingi oleh Malek Mahmud dan Bahktiar Abdullah. Pada tanggal 12 Mei RI-GAM menandatangani Jeda kemanusiaan yang difasilitasi oleh HDC di Bavois yang dilakukan oleh Hasan Wirajudha (RI) dan

Zaini Abdullah (GAM) pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Gusdur lebih cocok sebagai Bapak Bangsa bukan birokrat apalagi Presiden. Pada 2 Juni-2 September penerapan Jeda kemanusiaan I serta pada 15 September-15 Januari 2001 dilakukan Penerapan Jeda Kemanusiaan II. Tanggal 21 Maret 2001 Indonesia menyetujui operasi Militer terbatas (OMT) menyusul penembakan Helikopter yang membawa rombongan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Aceh Utara. Pada 9 Agustus Presiden Megawati menandatangani UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sejak itu sebutan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Propinsi NAD. Pada tahun 2001-2002 Pemerintah melaksanakan operasi pemulihan keamanan berdasarkan Inpres No. 4 dan 7 tahun 2001 dan Inpres No. 1 tahun 2001. Pada tanggal 2-3 Februari 2002 RI dan GAM merintis dialog yang dimediasi oleh HDC di Jenewa Swiss. Delegasi RI dipimpin oleh Wiryono Sastrowardoyo, GAM diwakili Perdana Menteri Malek Mahmud. Pada tanggal 9-10 Mei 2002 dialog lanjutan RI-GAM di Jenewa. Selanjutnya 15 Maret 2002 Gubernur Aceh Abdullah Puteh mendeklarasikan penerapan Syariat Islam di Banda Aceh yang bertepatan dengan 1 Muharram 1423 H sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2001. Tanggal 9 Desember 2002 setelah Jeda Kemanusiaan I dan II gagal, RI-GAM merintis perjanjian perhentian permusuhan *Cessation of Hostilities Agreement* (COHA) yang ditandatangani oleh Zaini Abdullah (GAM) dan Wiryono Sastro (RI) di Jenewa.

Pada tanggal 25 Januari 2003 wakil Indonesia-GAM dan HDC meresmikan Kecamatan Indrapuri Aceh Besar sebagai Zona Damai Pertama. Indonesia membubarkan JSC. Tanggal 17-18 Mei 2003 Perundingan RI-GAM di Tokyo Jepang gagal dilaksanakan. Pada Tanggal 19 Mei-18 November Aceh ditetapkan sebagai daerah Darurat Militer (DM) II berdasarkan Kepres No. 28 Tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Tanggal 19 November- 18 Mei 2004 DM I diperpanjang ke DM II berdasarkan Kepres No. 97 Tahun 2003. Memasuki tahun 2004 tanggal 5 April Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden pada massa DM di Aceh. Pada 19 Mei-18 November 2004 DM II berakhir dilanjutkan Darurat Sipil (DS) I berdasarkan Kepres No. 43 tahun 2004 oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 19 November-18 Mei 2005 DS I diperpanjang ke DS II berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2004.

Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadilah Gempa Bumi 8,9 Skala Richter disusul gelombang Tsunami melanda hampir seluruh daerah Aceh dan Nias Sumatra Utara serta 11 negara lainnya. Pada tanggal 27 Desember 2004 GAM secara sepihak menyatakan gencatan senjata berkaitan dengan musibah Tsunami. Pada tanggal 27-29 Januari 2005 dialog RI-GAM pertama yang difasilitasi oleh yayasan Crisis Management Initiative (CMI). Pada 21-23 Februari 2005 dialog kedua RI-GAM di Helsinki. Tanggal 12-16 April 2005 dialog ketiga RI-GAM di Helsinki, tanggal 26-31 Mei dialog keempat RI-GAM di Helsinki, pada tanggal 12-17 Juli dialog kelima RI-GAM di Helsinki dan pada tanggal 15 Agustus 2005 RI-GAM melaksanakan perjanjian damai yang ditandatangani oleh Malek Mahmud (GAM) dan Hamid Awaluddin (RI) di Helsinki. Proses perdamaian yang ditandai dengan lahirnya MoU Helsinki tahun 2005 telah mentransformasi Aceh dari medan perang menjadi arena pertarungan politik paling dinamis sekaligus laboratorium demokratisasi yang melahirkan terobosan-terobosan inovatif dalam politik Indonesia. Laga senjata berubah menjadi adu argument, hutan belantara, berubah menjadi hamparan meja perundingan. Komunikasi emosional menjadi rasional, lawan menjadi kawan, egois menjadi

humanis. Dalam konteks ini, politik, negosiasi, komunikasi, diplomasi secara santun menjadi taruhan yang tidak mungkin dinafikan.

Walaupun perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra pada kalangan elit politik di Jakarta, namun dari segi keberanian, tampaknya pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla (SBY-JK) telah melaupai batas-batas kekhawatiran beberapa presiden sebelumnya. SBY-JK tetap konsisten memilih cara damai sebagai resep untuk mengakhiri konflik Aceh melalui kebijakan politik pengintegrasian yang tercermin pada butir-butir dalam MoU. Sejak Januari Juli 2005, pemerintah SBY-JK melakukan lima babak komunikasi politik formal maupun informal dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk melakukan perundingan sebagai cara damai menyelesaikan konflik Aceh. Pembicaraan informal ini difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) sebuah lembaga yang dipimpin bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dengan mengambil tempat di Koenigstedt Estate yang terletak diluar Ibukota Finlandia Helsinki.⁷ Pemerintahan SBY-JK melakukan terobosan melalui pendekatan baru⁸ dalam penyelesaian pemberontakan GAM, yang mementahkan pendekatan-pendekatan sebelumnya, walaupun banyak pihak yang tidak setuju. Akhir dari komunikasi politik informal dilanjutkan dengan pertemuan formal yang melahirkan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Menatap masa depan Aceh yang lebih baik

Mengingat tensi politik dan ekonomi di wilayah bekas konflik seperti Aceh biasanya memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik yang bertarung. Dalam konteks inilah, politik kerap kali didefinisikan sebagai “*who gets what and when*”. Sebuah upaya untuk mencapai kekuasaan, yang sejatinya memang menarik minat banyak orang. Menurut Deliar Noer 1983, Politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.⁹

Momentum damai, bahwa setelah perjanjian damai ini tidak ada lagi perang, bumi Serambi Mekkah menjadi aman, rakyat bebas melakukan berbagai aktifitas tanpa ada ancaman dan teror. Nafas persengketaan dan permusuhan yang telah berakar lebih dari 30 tahun di Aceh mulai berhenti. Ia tergantikan dengan angin perubahan yang jauh lebih signifikan dan makin

⁷ Moch.Nuhasim, *Perundingan Helsinki; Jalan Menuju Dalam Aceh*. (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca MoU, Pustaka Pelajar, 2008), h. 108

⁸ Dianggap sebagai pendekatan baru, karena SBY-JK konsisten untuk menempuh jalur dialog yang tidak disertai oleh pengerahan pasukan keamanan. Di bawah supervisi Jusuf Kalla yang secara konsisten dan terus menerus untuk memilih cara damai dalam menyelesaikan konflik Aceh. Meskipun cara ini tidak sepenuhnya dapat disebut baru, karena di masa Orde lama telah dilakukan oleh Soekarno dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Aceh dan pemberontakan-pemberontakan di daerah lain seperti PRRI/Permesta di Sumatera Barat. Dalam konteks penyelesaian DI/TII di Aceh, lihat M.Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, edisi revisi, (Jakarta: Media Da,wah, 2001). Sementara untuk penyelesaian PRRI/Permesta dapat dilihat dalam tulisan, Barbara Harvey Sillar, *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 78-83.

⁹Noer, Deliar. Pengantar ke Pemikiran Politik. (Jakarta: Rajawali. 1983) Nimmo, Dan, Komunikasi Politik, Tjun Surjaman (terj.). (Bandung : Rosdakarya, 1993) Powel Jr., Bingham. *Contemporary Democracies, Participan, Stability and Violence*. (New York : Harvard University Press. 1982)

melegakan. Simpul penting transformasi konflik menuju proses damai yang lebih stabil dan berkelanjutan telah dilalui. Aceh pasca tsunami yang secara fisik sudah hancur berantakan dan Aceh pasca konflik yang menyisakan puluhan ribu korban sudah mulai bangkit. Fakta Perdamaian tersebut telah memasuki usia empat tahun Agustus 2009. Simpul penting transformasi konflik menuju proses damai yang lebih stabil dan berkelanjutan telah dilalui. Kini, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengikat komitmen damai bagi semua *peace process for all*, bukan hanya pihak yang bertikai.

Momentum Pilkada, bahwa cahaya perdamaian itu makin bersinar ketika pilkada yang berlangsung 11 Desember 2006 paling demokratis telah mampu memberi ruang baru bagi sirkulasi kekuasaan di Aceh. Pilkada desember 2006 pun melahirkan pemimpin yang beragam, mulai dari kelompok yang selama ini terbuang dari siklus kekuasaan (outsider) hingga masyarakat sipil yang dianggap berprestasi untuk menjaga momentum membangun Aceh. Kemenangan calon independen dalam pilkada lalu menunjukkan besarnya keinginan dari masyarakat sipil Aceh untuk menyongsong perubahan politik pemerintahan dan mengharapkan adanya visi pembangunan yang lebih mengakar pada kepentingan masyarakat luas. Proses pemilihan yang nyaman dan belum pernah dialami bumi Iskandar Muda ini bahkan Indonesia sejak pemilu 1955, menggembirakan semua pihak: Jakarta, para stakeholders rehabilitasi dan rekonstruksi, kelompok sipil demokratis, dan akar rumput. Anggapan bahwa Pilkada Aceh 2006 lalu akan `berdarah-darah`, terbantahkan dengan realitas yang menyejukkan. Suksesnya pilkada 2006 di Aceh menjadi tonggak demokratisasi, pasca terpilihnya gubernur/wagub dan bupati/wabup/walikota/walkot di NAD. Yang terpenting adalah bagaimana mendorong kesejahteraan ekonomi di Aceh. Untuk itu, menjadi penting bagi Aceh dalam menentukan strategi memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Momentum lain adalah Pilpres 8 Juli 2009, namun siapapun yang akan terpilih jadi Presiden dan wakil presiden pada periode 2009 hingga 2014 nanti, diharapkan dapat membawa Aceh lebih maju dan bermartabat. Kita berdemokrasi ditengah-tengah kemiskinan dengan keterbatasan sumber daya manusia, terkadang yang diperdebatkan bukan substansial visi misi yang realistis namun yang dipertontonkan kegagalan-kegagalan. Bagi Aceh, Pilpres 2009 berbeda dengan Pemilu kemarin, artinya tidak ada orang Aceh yang jadi Capres atau cawapres. Namun sampai sat ini belum ada kampanye besar-besaran di Aceh yang dilakukan oleh para kontestan Pilpres. Namun element seperti SIRA yang menjadi pemain. PA sepertinya mengambil jalan aman.

Sehingga yang penting bagi Aceh adalah siapapun Presiden dan wakil Presiden, mesti dapat mempertahankan perdamaian Aceh, pembangunan Aceh berkelanjutan secara besar-besaran. Dengan melibatkan tokoh-tokoh Aceh dalam konteks nasional. Dengan memperkuat desentralisasi di berbagai bidang termasuk ekonomi. Pemimpin yang mampu menjadi mediator, pemimpin yang baik dan berkualitas, tidak penting Jawa non Jawa. Rakyat Aceh, membutuhkan rasa aman, damai, pembangunan berjalan, ekonomi meningkat, dan hak-hak sosial, budaya dan politik, ruang public menjadi penting diperjuangkan. Demikian.

****Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh***